

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon: (0370) 7856244, Faksimile: 625341 Laman: ntb.kemenkumham.go.id, Email: kemenkumham.go.id

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Rabu, 20 Maret 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Syamsul Anwar, ST., MT.

Jabatan

: Kepala Bidang Tata Ruang

Instansi

: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Lombok Timur

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama

: Ignatius M.T. Silalahi, S.H., M.H.

Jabatan

: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Instansi

: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

selanjutnya sebagai Perwakilan Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

- 1. Berdasarkan surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Nomor 100.32/2/KUM/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi mengenai Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Sambelia dan Sekitarnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 yang dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Perwakilan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Perwakilan Pemrakarsa;
- Sesuai hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
- Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka

2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Lombok Timur, 20 Maret 2024

a.n. Ketua Tim Kelompok Kerja

Pengharmonisasian,

Syamsul Anwar, \$T., MT.

KAB Pemrakarsa,

Ignatius M.T. Silalahi, S.H., M.H.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

Parlindungan

NIP 19700701/1992031002